



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 468 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana kepada masyarakat, perlu diatur mengenai pemberian layanan informasi publik;

b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
8. Peraturan Gubernur Nomor 159 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik;
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2022

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pekerjaan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus berpedoman kepada peraturan dan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Agustus 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, *K*


WIDYASTUTI
NIP. 196406291989122001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
4. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan Keuangan Negara Jakarta V;
6. Kepala Pusat Promosi Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
7. Kepala Biro Umum Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
8. Masing-masing yang bersangkutan.

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 408 Tahun 2022
Tanggal : 25 Agustus 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

- Pengarah : 1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
2. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
- Pejabat Pengelola Informasi
Data Dokumentasi : Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
- Sekretaris : Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
- Tim Perimbangan Pejabat
Pengelola Informasi dan
Dokumentasi : 1. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas
Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas
Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta
4. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Informasi Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
- Bidang Pengelolaan Informasi
Publik : Kepala Seksi Data, Informasi dan Hubungan
Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
- Bidang Pelayanan Informasi : 1. Para Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan 6 Wilayah
Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Kepala Bidang Dinas Kesehatan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta
4. Para Kepala Puskesmas Kecamatan 6 Wilayah
Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

5. Para Kepala Unit Pelayanan/Unit Pelaksana
Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta
6. Para Kepala Subbagian/Seksi Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Sekretariat Pejabat Pengelola : Kepala Seksi Data, Informasi dan Hubungan
Masyarakat Dinas Kesehatan Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta

Bidang Dokumentasi dan : Subbagian Umum Dinas Kesehatan Provinsi
Arsip Daerah Khusus Ibukota Jakarta

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor : 708 TAHUN 2022
Tanggal : 15 Agustus 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN TUGAS
Pengarah/Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: a. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi public dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan b. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: a. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Menerima permohonan keberatan atas penolakan dari permohonan informasi publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan d. Sebagai perwakilan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam proses sengketa informasi.
Sekretaris Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	: a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD; b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan member layanan informasi kepada publik; c. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID pada SKPD/UKPD; d. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi;

		e. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; f. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; g. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID pada SKPD/UKPD; h. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Kesehatan dan Informasi dan Komisi Informasi serta lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; i. Membuat laporan layanan informasi; dan j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.
Tim Pertimbangan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	a. Melakukan klarifikasi dan verifikasi keberatan atas pelayanan informasi pada PPID; b. Membahas, menyelesaikan dan memutuskan keberatan atas pelayanan informasi pada PPID.
Bidang Pengelolaan Informasi Publik	:	a. Penyajian data dan informasi melalui website http://ppid.jakarta.go.id dan/atau papan pengumuman di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; b. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi; dan c. Penyimpanan, pemeliharaan dan/atau perubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
Bidang Pelayanan Informasi	:	a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi, sarana dan membantu pemohon memperoleh informasi; b. Menerima dan melayani permintaan informasi serta menyampaikan salinan informasi yang dicemoohkan; c. Menyampaikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal yang digunakan oleh mayoritas penduduk setempat;

		d. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID pada SKPD/UKPD apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasainya; e. Menetapkan permintaan informasi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi tersebut; dan f. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa.
Sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	:	a. Menyediakan sarana dan prasarana atas pelayanan informasi pada PPID; b. Memberikan dukungan administrasi atas kegiatan pelayanan informasi pada PPID.
Bidang Dokumentasi dan Arsip	:	a. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya; dan b. Pelayanan penggunaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta arsip dan dokumen lainnya.

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,


WIDYASTUTI
NIP 196406291989122001